

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari pembaharuan kurikulum yang terus menerus terjadi dalam tiap priode tertentu kurikulum selalu devaluasi. Dari masa orde lama hingga sekarang, pemerintah terus melaksanakan evaluasi dengan menerapkan perubahan berbagai kebijakan, terutama di sektor pendidikan, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia (Husaini, 2021).

Pendidikan adalah elemen terpenting yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan perkembangan atau kemajuan suatu bangsa. Ini tercermin dalam proses pendidikan yang dapat menghasilkan ide-ide serta pemikiran kreatif dan inovatif yang berdampak pada dinamika kemajuan zaman. Proses ini memerlukan suatu pengembangan kurikulum yang memiliki fungsi sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kebijakan pendidikan yang efektif dapat dilihat dari pelaksanaan kurikulum yang diterapkan, karena menurut Nupita (2023), kurikulum adalah inti pendidikan yang menentukan arah proses pendidikan. Mengacu pada UU No.20 tahun 2003, dapat dimaklumi bahwa kurikulum merupakan serangkaian rencana pembelajaran yang berhubungan dengan tujuan, materi, sumber ajar, dan metode yang diterapkan serta dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan juga berfungsi sebagai alat untuk membangun manusia yang berperadaban, menanamkan nilai-nilai kebaikan, dan mengembangkan individu menuju kualitas yang lebih tinggi (Sujana, 2019). Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kegiatan proses belajar yang dilakukan agar siswa dapat belajar secara aktif dan mengembangkan potensinya menjadi lebih baik dalam hal kecerdasan, pengetahuan, dan karakter (Sugihartono, 2020).

Pendidikan di Indonesia selalu mengalami kemajuan dalam menciptakan berbagai model pembelajaran, baik dalam hal strategi, metode,

maupun berkaitan dengan aspek administratif atau perancangan pelaksanaan pembelajarannya. Para pengajar memiliki tanggung jawab untuk mencapai kesuksesan dalam proses pembelajaran. Peserta didik juga memiliki tanggung jawab penting untuk memahami serta mempelajari materi yang diberikan agar dapat menjadi generasi yang cerdas dan berhasil. Dalam sejarah Indonesia telah mengalami lebih dari sepuluh kali pembaruan kurikulum yang memengaruhi metode pengajaran sejak awal kemerdekaan. Soegiri dan Priatmoko (2022) menyebutkan bahwa kurikulum di Indonesia telah mengalami transformasi dari Rentjana pembelajaran 1947 sampai yang paling baru, yaitu "Merdeka Belajar." Merdeka belajar yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah pimpinan menteri pendidikan Nadiem Makarim telah melakukan perubahan kurikulum sebanyak tiga kali. Tujuan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang berkembang seiring dengan kemajuan zaman dalam mencapai tujuan pembelajaran, baik melalui strategi, metode, maupun aspek administratif atau rancangan pelaksanaan pembelajarannya. Diharapkan pendidikan Indonesia mampu mempersiapkan siswa yang memiliki daya saing dimasa depan. Program merdeka belajar ini merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicetuskan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem merumuskan kebijakan merdeka belajar bukan tanpa sebab. Literasi yang sudah diterapkan di sekolah seyogyanya tidak sekadar menilai kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis konten dan memahami konsep dari sebuah bacaan. Kemampuan numerasi yang devaluasi bukan pelajaran matematika, melainkan penilaian kemampuan siswa dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan sehari-hari. Aspek lainnya yakni survei karakter, bukanlah sebuah ujian, tetapi pengukuran sejauh mana nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah diterapkan oleh siswa (Mustaghfiroh, 2022). Pernyataan serupa juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah sekumpulan rencana dan pengaturan

yang berkaitan dengan tujuan, isi, materi ajar, serta metode yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran dan pengajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan khusus dalam pendidikan ini mencakup sasaran pendidikan nasional serta keselarasan dengan ciri, kondisi, dan potensi daerah, lembaga pendidikan, peserta didik, serta kemampuan dan kesiapan pendidik. Mustabsyiroh (2020) mengungkapkan bahwa kurikulum merdeka ini menekankan kepada siswa untuk mengembangkan sikap positif, meraih prestasi akademik, terlibat aktif dalam diskusi, memiliki kemandirian dalam proses belajar, serta mengembangkan keterampilan psikomotorik yang baik untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Kurikulum merdeka berfokus pada peningkatan dan keselarasan antara kemampuan sikap (*attitude*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*). Kurikulum Merdeka disusun dengan memperbaiki pola pikir sebagai berikut (1) pembelajaran yang berorientasi pada guru bertransformasi menjadi pembelajaran yang menitikberatkan pada peserta didik. Peserta didik perlu memiliki berbagai pilihan dalam materi yang dipelajari untuk mencapai kompetensi yang setara; (2) Proses belajar dari guru kepada peserta didik yang awalnya satu arah bertransformasi menjadi pembelajaran interaktif (interaksi antara guru-peserta-masyarakat-lingkungan, serta melalui sumber atau media lainnya); (3) Pembelajaran yang terpisah beralih menjadi pembelajaran berbasis jaringan. Peserta didik dapat memperoleh informasi dari siapapun dan dari mana saja; (4) Pembelajaran pasif beralih menjadi pembelajaran aktif yang berorientasi eksplorasi (di mana siswa secara aktif mencari pengetahuan yang lebih didukung oleh model pembelajaran berbasis sains); (5) Pola belajar individu berubah menjadi pembelajaran kolaboratif.; (6) Pembelajaran bertransformasi menjadi pembelajaran yang berbasis multimedia; (7) Pembelajaran tersentralistik berubah menjadi berorientasi pada kebutuhan pengguna (*customer*) dengan memperkuat pengembangan potensi unik masing-masing peserta didik; (8) Pembelajaran satu disiplin ilmu (*monodisiplin*)

berubah menjadi pembelajaran multidisiplin; dan (9) Pembelajaran pasif diubah menjadi pembelajaran kritis (Ismaya, 2021).

Menurut Kusumaryono dalam M. Yamin (2020) bahwa penerapan Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim terdapat beberapa poin: Pertama, Konsep Merdeka Belajar adalah solusi untuk permasalahan yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pendidikan. Kedua, pengurangan beban guru dalam melaksanakan tugasnya dilakukan dengan memberikan kebebasan dalam menilai pembelajaran peserta didik menggunakan berbagai jenis dan bentuk instrumen penilaian, bebas dari pembuatan administrasi yang memberatkan, serta terhindar dari intimidasi, kriminalisasi, atau politisasi terhadap guru. Ketiga, memperluas pemahaman kita mengenai berbagai kendala yang dihadapi guru dalam menjalankan tugas pembelajaran di sekolah, mulai dari isu penerimaan siswa baru, administrasi guru dalam persiapan mengajar termasuk RPP, proses pembelajaran, hingga masalah evaluasi seperti UN. Keempat, sebagai penjaga utama dalam menentukan masa depan bangsa melalui proses belajar, penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas, melalui kebijakan pendidikan yang akan bermanfaat bagi guru dan siswa.

Konsep Merdeka Belajar diusung sebagai reformasi sistem pendidikan guna menghadapi perubahan zaman dan mendukung kemajuan bangsa. Gagasan ini berusaha mengembalikan nilai-nilai mendasar dari pendidikan, yakni pendidikan yang menghargai kemanusiaan dan memberi ruang kebebasan bagi siswa untuk berkembang. Dalam konsep pembelajaran merdeka, guru dan siswa adalah subjek dalam sistem pendidikan. Guru pengampu mata pelajaran kini tidak lagi dianggap sebagai sumber kebenaran tunggal tetapi guru dan siswa berkolaborasi untuk mencari kebenaran. Posisi guru di kelas bukanlah untuk menetapkan atau menyamakan kebenaran berdasarkan pandangan guru, tetapi untuk mencari kebenaran dan mendorong kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami dunia serta fenomena yang ada. Kurikulum merdeka juga berupaya mengurangi beban kerja yang terlalu fokus kepada aspek administratif. Dengan demikian sekolah

berserta semua yang terlibat dalam pendidikan diberikan kebebasan untuk berinovasi, belajar secara mandiri, dan menumbuhkan kreatifitas peserta didik.

Para guru diberi kebebasan penuh untuk mengkreasikan gagasan atau ide-ide kreatif dalam proses pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk berkembang dengan sesuai bakat dan minatnya(Suryaman, 2020). Ide-ide kreatif dari guru akan membuat siswa merasa nyaman dan senang selama proses pembelajaran. Guru diminta untuk membimbing dan bertanggung jawab terhadap siswa-siswanya dalam melaksanakan pembelajaran mandiri. Guru berperan inti dalam penerapan kurikulum ini. Semua pihak yang dalam prosesnya dipimpin oleh kepala sekolah juga bertanggung jawab sepenuhnya untuk meningkatkan mutu pendidik dalam pengajaran.

Kemdikbud RI berupaya menemukan inovasi dengan ditreapkanya kebijakan Merdeka Belajar untuk meningkatkan pendidikan. Setidaknya ada 5 episode merdeka belajar:

1. Episode pertama, ada empat kebijakan baru meliputi: Ujian Nasional (UN) akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) dan Survei Karakter. Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dikelola oleh sekolah, serta Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Pada tahap penerimaan siswa baru (PPDB) Sistem Zonasi diperluas (kecuali wilayah 3T).
2. Episode kedua kebijakan kampus merdeka, yaitu: mempermudah pembukaan program studi baru, penyederhanaan proses akreditasi Perguruan Tinggi. Kemudahan sebagai PTMBA, hak belajar tiga semester di luar program studi.
3. Episodetiga, perubahan mekanisme dana BOS yang langsung dikirim ke rekening milik sekolah. Kemudian pihak sekolah bebas menggunakan dana BOS. Besaran dana BOS setiap siswa mengalami peningkatan. Laporan penggunaan dana BOS terdapat perbaikan agar lebih transparan dan akuntabel.

4. Episode empat tentang organisasi penggerak agar lembaga-lembaga pendidikan dapat berkolaborasi dengan sekolah demi meningkatkan mutu pendidikan.
5. Episode kelima guru penggerak, yaitu program yang berfokus pengembangan kepemimpinan dan pedagogik guru.

Saat ini menurut data dari Kemendikbudristek (2023) terdapat sekitar 2.500 sekolah penggerak yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Semua mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut harus mengikuti pedoman kurikulum ini, termasuk didalamnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Dalam penerapannya muncul beberapa permasalahan yang dihadapi oleh para guru, diantaranya: (1) Para guru belum berpengalaman dalam penerapan kurikulum Merdeka, (2) Terbatasnya akses belajar untuk memahami kurikulum, (3) Penguasaan teknologi informasi yang terbatas oleh para guru senior, (4) Pemahaman yang belum mendalam tentang hakikat kurikulum Merdeka.

Fameska (2023) menyatakan bahwa tujuan utama pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah membimbing peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi muslim yang sejati, memiliki iman yang kokoh, menjunjung nilai-nilai kebaikan, berakhlak mulia, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan negara. Pendidikan Agama Islam perlu melakukan perbaikan dan siap untuk menghadapi serta menjalankan kurikulum merdeka belajar. Materi PAI yang sangat luas harus disaring untuk diambil yang paling utama dan mendasar agar anak bisa menguasainya dengan baik, sehingga mereka memiliki iman dan ketakwaan yang kuat dalam menghadapi era society 5.0. Materi PAI yang begitu luas tidak mungkin diajarkan secara lengkap dalam proses pembelajaran di sekolah.

Konsep merdeka belajar di SMAN 1 Banjarnegara diterima dengan baik oleh kepala sekolah sebagai pemimpin, waka kurikulum sebagai pengambil keputusan dalam pengajaran, guru-guru sebagai pengajar, serta siswa-siswi sebagai sasaran program pembelajaran, semuanya menyambut positif

pelaksanaan merdeka belajar. Langkah pertama yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menerapkan merdeka belajar di SMAN 1 Banjarnegara adalah memberikan pemahaman kepada semua pihak yang terlibat di sekolah tentang pentingnya pelaksanaan merdeka belajar dan efek yang dapat ditimbulkan. Tahap kedua adalah melaksanakan pelatihan In House Training untuk guru agar mereka bisa menerapkan kurikulum merdeka secara efektif. Selanjutnya, sekolah berusaha untuk mengoptimalkan anggaran dalam proses pembelajaran guna mewujudkan merdeka belajar.

Wakil kepala sekolah bidang kurikulum berperan sebagai penggerak utama proses kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Banjarnegara mencetuskan gagasan untuk menerapkan merdeka belajar karena beliau juga merupakan bagian dari komunitas guru penggerak yang pernah bekerja sebagai Pengajar Praktik dan Fasilitator Guru Penggerak. Langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan merdeka belajar di SMAN 1 Banjarnegara dimulai dengan diskusi kecil antara kepala sekolah, wakasek, dan pengurus komite. Setelah ide tersebut disetujui, sosialisasi dilakukan kepada para pembina dan staf administrasi, kemudian dilanjutkan kepada orang tua serta siswa. Sekolah ini mulai menerapkan kurikulum merdeka belajar ditahun ajaran 2020-2021. Penerapannya diawali dengan praktik penyusunan kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru dan peserta didik. Kesepakatan kelas ini memuat kewajiban peserta didik, hal-hal yang dilarang dilakukan, etika selama pelajaran, sopan santun dalam berpendapat atau bertanya, batas waktu masuk kelas, warna cover buku, batas waktu pengumpulan tugas dan lain sebagainya.

Konsep merdeka belajar disambut baik oleh warga SMAN 1 Banjarnegara karena konsep merdeka belajar ini dalam penerapannya dapat menggali potensi peserta didik, dalam proses pembelajaran peserta didik diberi kesempatan untuk memilih gaya belajar yang efektif untuk dirinya, bebas berekspresi dan berkreasi namun tetap memperhatikan kesepakatan kelas dan aturan akademik serta tata tertib peserta didik.

B. Identifikasi Masalah

Sejak kebijakan Merdeka Belajar diperkenalkan, penerapan Kurikulum Merdeka di mata pelajaran PAI di SMA Negeri 1 Banjarnegara masih menghadapi masalah berikut:

1. Kesiapan Guru

Kurangnya pelatihan praktik yang memadai sehingga perencanaan pembelajaran kurang inovatif.

2. Literasi Digital & Sumber Lokal

Akses internet tidak stabil dan literasi digital guru rendah sehingga minim pemanfaatan platform daring (Google Form, LMS). Modul PAI kontekstual berbasis kearifan lokal belum tersedia materi terkesan generik.

3. Pendekatan Karakter & Spiritual

Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di PAI masih bersifat diskusi teoritik; praktik spiritual (wudhu, tilawah, adzan) dan refleksi nilai belum terstruktur.

4. Asesmen Holistik

Tes kognitif masih mendominasi rubrik afektif dan psikomotorik sering hanya lisan tanpa dokumentasi sehingga umpan balik kurang konkrit dan sulit memantau perkembangan siswa.

5. Dukungan Sekolah & Pengawasan

Hanya sebagian guru ikut program Sekolah Penggerak sehingga praktik baik belum tersebar merata dan pembinaan kolaboratif masih terbatas.

Kesemua masalah ini menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka pada PAI memerlukan strategi terpadu melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik dan terstruktur.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah pada tesis ini mengenai implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas X dan XI yang

dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Banjarnegara Tahun Pelajaran 2023/2024. Adapun SMA Negeri yang menjadi fokus penelitian ini adalah SMA Negeri 1 Banjarnegara

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perencanaan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?
3. Bagaimanakah evaluasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perencanaan Kurikulum Merdeka dalam Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PAIdi SMAN1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
3. Untuk mengetahui evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada mapel Pendidikan Agama Islam di SMAN1 Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.

F. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat positif berikut:

1. Manfaat Teoretis, untuk memperkaya pemahaman dalam bidang ilmu serta pengembangan ilmiah terutama terkait hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh desain dan penerapan Kurikulum Merdeka.

2. Keuntungan Praktis, yakni berkontribusi kepada penerapan Kurikulum Merdeka untuk menjadi patokan bagi siswa dalam proses belajar mengajar demi mencapai keberhasilan pendidikan.

